



Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Sukamakmur

Vina Oktavia¹, Evi Priyanti², Rahman³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email:¹ 2210631180163@student.unsika.ac.id, ² evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id,

³ rahman@fisip.unsika.ac.id

*Penulis korespondensi: 2210631180163@student.unsika.ac.id

Abstrack: *This study examines flood disaster mitigation efforts carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Sukamakmur Village, Karawang Regency. A qualitative method with a case study approach was used. The study is based on Strategy Theory by James Brian Quinn (2003), which includes three dimensions: objectives, policies, and programs. Flooding is a recurring annual problem in the village, requiring effective mitigation efforts. The results show that mitigation objectives focus on improving community preparedness and capacity in facing flood risks. Policies are implemented through strengthening community-based non-structural mitigation, such as the establishment of Disaster Resilient Villages (DESTANA), disaster volunteer groups, and disaster risk assessments. Mitigation programs include disaster awareness socialization, training, and dissemination of daily weather information. BPBD also coordinates with village governments, sub-district task forces, and the River Basin Management Agency (BBWS) to support implementation. The findings indicate that these efforts have positively improved community knowledge, preparedness, and participation in disaster response. However, challenges remain, including limited budgets, inadequate infrastructure, limited human resources, and suboptimal cross-sector coordination. Overall, this study highlights the important role of BPBD in strengthening community-based flood disaster mitigation in Sukamakmur Village.*

Keywords: *Flood Disaster; Mitigation; Program; Regional Disaster Management Agency; Sukamakmur Village.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Desa Sukamakmur, Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi oleh James Brian Quinn (2003), yang mencakup tiga dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Banjir merupakan masalah yang terjadi hampir setiap tahun di desa tersebut sehingga memerlukan upaya mitigasi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan mitigasi difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko banjir. Kebijakan dilaksanakan melalui penguatan mitigasi non-struktural berbasis masyarakat, seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), relawan kebencanaan desa, serta penilaian risiko bencana. Program mitigasi meliputi sosialisasi kebencanaan, pelatihan, dan penyebaran informasi cuaca harian. BPBD juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, satuan tugas kecamatan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran BPBD dalam memperkuat mitigasi bencana banjir berbasis masyarakat di Desa Sukamakmur.

Kata Kunci: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Bencana Banjir; Desa Sukamakmur; Mitigasi; Program.

1. PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika volume air secara berlebihan merendam suatu daratan (Taryana, El Mahmudi, and Bekti 2022). Penyebab banjir bisa terjadi karena beberapa faktor alami, seperti curah hujan yang lebih besar dari biasanya, permukaan air yang naik, perubahan suhu, jebolnya tanggul atau bendungan, mencairnya salju secara cepat, serta terhalangnya aliran air di suatu tempat. Selain itu, tindakan manusia juga bisa memicu terjadinya banjir. Dampak dari adanya banjir sangat dirasakan oleh masyarakat, oleh

karena itu penting untuk melakukan mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana banjir.

Kabupaten Karawang termasuk daerah yang rentan mengalami bencana alam, seperti banjir. Pada Februari 2021, Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah yang terkena banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum yang tersebar hingga 15 kecamatan. Jumlah warga terdampak akibat jebolnya tanggul tersebut sebanyak 9.331 KK atau 28.329 jiwa, sementara 1.075 diantaranya atau 4.184 jiwa harus mengungsi (BPBD Kabupaten Karawang, 2023). Menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Karawang (2023), banjir yang ada di Kabupaten Karawang disebabkan karena curah hujan yang begitu tinggi dan kapasitas sungai atau irigasi tidak mampu menampung debit air. Salah satu wilayah yang sering terdampak banjir di Kabupaten Karawang adalah Desa Sukamakmur yang mengalami kerentanan cukup tinggi akibat kondisi lingkungan dan sistem pengelolaan drainase yang belum optimal.

Banjir tidak hanya dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara terstruktur dan berkelanjutan. Dampak banjir dapat mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi masyarakat, kesehatan lingkungan, hingga menurunkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat terdampak. Dalam kondisi tersebut, mitigasi bencana menjadi langkah penting yang harus dilakukan, Upaya mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yaitu dengan melakukan dukungan normalisasi yang dimulai dari muara sungai dengan alat berat jenis *excavator amphibious* guna melakukan pengerukan sedimentasi agar mengurangi risiko banjir (BNPB, 2021).

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan di beberapa titik rawan banjir, terutama daerah yang berpotensi mengalami kebocoran tanggul di wilayah Kabupaten Karawang. Selanjutnya untuk upaya pencegahan banjir, telah diadakan rapat dengan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Bappeda, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kemudian untuk mengedukasi masyarakat upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yaitu dengan menggelar Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, dengan harapan mampu mengedukasi masyarakat dalam menanggulangi bencana.

Meskipun berbagai upaya mitigasi telah dilakukan, pada kenyataannya banjir masih terus terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Karawang, termasuk di Desa Sukamakmur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi mitigasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

lingkungan, terbatasnya sarana pendukung mitigasi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta faktor koordinasi antar pihak terkait. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD dalam mewujudkan sistem mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Taslim, Ahmad Jamil Pasaribu, dan Azhari Aziz Samudra tahun 2024 mengenai mitigasi bencana banjir di Kota Tangerang Selatan, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana melalui simulasi, penyebaran informasi mitigasi, serta pembangunan sistem kesiapsiagaan masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori strategi dari James Brian Quinn yang menekankan tiga dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaruan pada lokus penelitian yang dilakukan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, serta fokus kajian yang lebih diarahkan pada tahap mitigasi pra-bencana sebagai upaya pengurangan risiko banjir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial dan kebencanaan, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana banjir di Kabupaten Karawang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut (Creswell 2010:04) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami pentingnya suatu masalah sosial atau kemanusiaan bagi sejumlah besar populasi atau sekelompok orang. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur. Adapun jenis penelitian studi kasus dipilih karena peneliti memfokuskan kajian pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sehingga dapat menggambarkan kondisi, strategi, serta kendala yang terjadi secara lebih rinci dan komprehensif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat melakukan wawancara dengan para informan, peneliti telah menetapkan kode-kode para informan sesuai dengan jabatannya untuk memudahkan pencatatan dan pengolahan data. Adapun kode dan jabatan para informan tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Kode Informan

NO	KODE	NAMA	JABATAN
1.	A1	Ilyas Sudikno Yahya, S.Psi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Karawang
2.	B1	Dede Sunandar	Kepala Desa Sukamakmur
3.	C1	Ahmad	Masyarakat Dusun II
4.	C2	Uji Sutisna	Masyarakat Dusun III
5.	C3	Sohib	Masyarakat Dusun I
6.	C4	Aca	Masyarakat Dusun I
7.	C5	Kokom Komalasari	Masyarakat II

Tujuan BPBD Kabupaten Karawang dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Sukamakmur

Dari hasil wawancara langsung bersama BPBD Kabupaten Karawang, tujuan utama mitigasi lebih difokuskan pada aspek non-struktural, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagaimana disampaikan pada saat wawancara langsung dengan Informan A1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karawang sebagai berikut:

“Pada intinya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana” (Informan A1)

Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, diseminasi informasi cuaca, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui sosialisasi KIE dan penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, tujuan mitigasi tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang tangguh. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyatakan bahwa banjir masih sering terjadi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Jika hujan deras, hitungan jam juga sudah bisa terjadi banjir disini” (Informan C1)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan C3 yang menyatakan bahwa:

“Ditahun 2026 saja bulan Januari sudah 3 kali terjadi banjir dengan ketinggian muka air 3 meter” (Informan C3).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerentanan wilayah terhadap banjir masih bisa dikatakan sangat tinggi. Dampak banjir yang dirasakan masyarakat juga masih tergolong cukup besar, terutama pada sektor permukiman dan ekonomi. Beberapa informan menyebutkan bahwa:

“Yang paling terdampak yaitu rumah, karena barang-barang banyak yang rusak, ekonomi juga jadi terganggu, tidak bisa mencari nafkah karena akses sangat sulit” (Informan C4).

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menyampaikan bahwa banjir terjadi secara berulang setiap musim hujan, sebagaimana diungkapkan oleh informan C5 pada saat diwawancarai dirumahnya sebagai berikut:

“Sejak 2010, jika hujan sehari-hari sudah pasti terjadi banjir” (Informan C5).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mitigasi dalam mengurangi dampak banjir belum bisa dikatakan sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, Pemerintah Desa Sukamakmur juga menegaskan bahwa kondisi banjir dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Kepala Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa:

“Dari Januari sampai Februari 2026 saja sudah terhitung 4 kali banjir, dan hampir semua dusun terdampak” (Informan B1).

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor geografis desa yang berada di antara aliran Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, sehingga memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah desa mengharapkan adanya penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan banjir. Lebih lanjut, masyarakat juga mengungkapkan harapan agar tujuan mitigasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap permasalahan banjir. Salah satu informan menyatakan bahwa:

“Kami berharap dapat diberikan solusi yang konkret untuk ke depannya, bukan hanya bantuan logistik saja” (Informan C4).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan oleh BPBD dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan pengurangan dampak banjir secara nyata. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tujuan utama mitigasi yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Karawang telah mengarah pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan non-struktural. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, tujuan tersebut belum

sepenuhnya mampu menjawab permasalahan banjir yang terus berulang di Desa Sukamakmur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara peningkatan kapasitas masyarakat dan penanganan yang bersifat struktural, agar tujuan mitigasi dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kebijakan BPBD Kabupaten Karawang Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Sukamakmur

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Karawang, kebijakan mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur lebih fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Dalam pelaksanaannya, BPBD tidak memiliki regulasi khusus yang secara rinci mengatur mitigasi banjir di Desa Sukamakmur, namun BPBD berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan bencana di tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan oleh informan A1 dari BPBD Kabupaten Karawang sebagai berikut:

“Terkait kebijakan, untuk regulasi secara hukum itu tidak ada, akan tetapi kami mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui DESTANA” (Informan A1)

Lebih lanjut, Informan A1 menjelaskan bahwa bentuk penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui beberapa program, seperti:

“Membuat forum pengurangan risiko bencana, membuat kajian risiko bencana desa, membuat relawan kebencanaan tingkat desa, kemudian membuat SK DESTANA sebagai legalitas” (Informan A1)

Selain itu, BPBD juga mendorong adanya evaluasi secara berkala terhadap tingkat kesiapsiagaan desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Informan A1 bahwa:

“Didorong untuk melakukan penilaian ketangguhan desa setiap tahunnya. Dengan harapan dari penilaian itu menjadi tolak ukur kekurangan sebelumnya bisa dipenuhi di tahun berikutnya sebagai bahan evaluasi” (Informan A1)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Karawang lebih fokus pada pendekatan mitigasi non-struktural dengan memberdayakan masyarakat desa. Kebijakan itu tidak berupa regulasi spesifik, akan tetapi diimplementasikan melalui program serta kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Pendekatan ini juga sejalan dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karawang yang mengidentifikasi Desa Sukamakmur sebagai daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Karena itu, BPBD menekankan

penguatan kapasitas masyarakat sebagai langkah mitigasi yang dianggap paling mungkin dilakukan secara berkelanjutan di tingkat desa.

Pelaksanaan program DESTANA di Desa Sukamakmur juga dirasakan oleh masyarakat melalui adanya sosialisasi dan kegiatan kebencanaan yang dilakukan bersama pemerintah desa dan BPBD. Informan C1 menyampaikan bahwa:

“Pernah ada sosialisasi dan pengarahan soal banjir dari satgas BPBD” (Informan C1)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Informan berikutnya yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat pernah diajak simulasi dan diberikan arahan kalau terjadi banjir” (Informan C4)

Dengan dibentuknya forum pengurangan risiko bencana, relawan kebencanaan desa, dan kegiatan sosialisasi, menurut peneliti hal tersebut sudah menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Karawang berupaya membangun sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat di Desa Sukamakmur. Kebijakan tersebut sangat penting mengingat kondisi geografis Desa Sukamakmur yang terletak di sekitar DAS Citarum dan Sungai Cibeet, sehingga daerah ini memiliki risiko banjir yang cukup tinggi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa kebijakan mitigasi yang ada masih lebih menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan teknis yang bersifat struktural untuk mengurangi risiko banjir. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan non-struktural BPBD dan kebijakan teknis instansi terkait sangat diperlukan agar mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kendala Kebijakan

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur, BPBD Kabupaten Karawang menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga dari aspek kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Informan A1 dari BPBD Kabupaten Karawang bahwa:

“Selain faktor alam, masih banyak masyarakat bahkan pemerintah desa yang belum teredukasi mengenai urgensi pentingnya membuat DESTANA, kesadaran akan bahaya bencananya masih kurang menyeluruh”(Informan A1)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mencatat bahwa pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana masih belum tersebar luas. Keadaan tersebut tampak dari masih

terdapat beberapa masyarakat yang menganggap banjir sebagai peristiwa tahunan yang biasa, sehingga kesiapsiagaan terhadap risiko bencana belum sepenuhnya terbangun dengan optimal. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara masyarakat. Informan C1 menyampaikan sebagai berikut:

“Masih ada warga yang kalau banjir sudah tinggi baru pada siap-siap mencari tempat yang lebih aman” (Informan C1)

Sementara itu pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan berikutnya yang mengatakan bahwa:

“Kadang banyak masyarakat yang masih menganggap kalau banjir itu hal biasa karena sudah sering terjadi” (Informan C3)

Selanjutnya selain kendala kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi banjir. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan A1 dari BPBD Kab. Karawang bahwa:

“Keterbatasan anggaran juga termasuk, karena memang kami tidak hanya fokus ke satu desa saja” (Informan A1)

Dengan demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan BPBD Kabupaten Karawang harus membagi prioritas penanganan bencana ke berbagai wilayah lain yang juga memiliki risiko bencana. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program mitigasi secara maksimal di Desa Sukamakmur. Kendala lainnya juga terdapat pada aspek koordinasi lintas sektor. Informan A1 dari BPBD Kab. Karawang menjelaskan sebagai berikut:

“Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor karena belum diwadahi dengan regulasi turunan seperti SK TRC (Tim Reaksi Cepat) Kabupaten” (Informan A1)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa koordinasi antar instansi dalam mitigasi bencana banjir belum berjalan dengan baik karena kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur pembagian tugas dan kolaborasi lintas sektor. Sebenarnya, penanganan banjir di Desa Sukamakmur memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, terutama dalam pengelolaan sungai, tanggul, dan infrastruktur pencegahan banjir. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memahami bahwa hambatan kebijakan mitigasi banjir di Desa Sukamakmur dipengaruhi oleh beberapa elemen, yaitu faktor alam, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana, anggaran yang terbatas, serta koordinasi antar instansi yang masih belum maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa mitigasi banjir memerlukan bukan hanya kesiapan masyarakat, tetapi juga dukungan kebijakan, anggaran, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga supaya upaya mitigasi dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Program BPBD Kabupaten Karawang dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Sukamakmur

Dalam mengimplementasikan program penanggulangan bencana banjir yang terus menerus terjadi di Desa Sukamakmur, maka dibuat kebijakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini untuk memperkuat pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan BPBD Kabupaten Karawang untuk mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur ialah dengan membuat program penguatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, pelatihan mitigasi bencana, serta penyebaran informasi diseminasi cuaca harian kepada masyarakat melalui media sosial BPBD Kabupaten Karawang. Program-program tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Desa Sukamakmur.

Selain itu, BPBD Kabupaten Karawang juga melakukan penguatan kapasitas kawasan melalui asistensi administrasi DESTANA dan penilaian ketangguhan desa sebagai bentuk evaluasi terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai upaya membangun kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Melalui program mitigasi tersebut, BPBD Kabupaten Karawang berharap masyarakat Desa Sukamakmur memiliki kemampuan untuk mengenali risiko bencana, melakukan upaya penyelamatan diri, serta mampu mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat banjir.

Program Mitigasi Banjir yang Dijalankan BPBD

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur, BPBD Kabupaten Karawang menjalankan beberapa program yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Program tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mengingat Desa Sukamakmur merupakan wilayah yang sering terdampak banjir setiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan langsung pada saat wawancara dengan Informan A1 dari BPBD Kabupaten Karawang sebagai berikut:

“Program mitigasi banjir yang sedang dilaksanakan hari ini yaitu dengan penyebaran informasi diseminasi cuaca harian, kemudian penguatan kapasitas masyarakat melalui DESTANA” (Informan A1)

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan penyebaran informasi diseminasi cuaca harian yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa:

“Adapun program sebelumnya yaitu pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, jadi fokus BPBD hanya penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana” (Informan A1)

Dibawah ini merupakan dokumentasi kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana banjir di Desa Sukamakmur:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa program mitigasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang lebih fokus pada mitigasi non-struktural dengan meningkatkan kesiapan dan keterampilan masyarakat untuk menghadapi bencana banjir. Program-program seperti penyampaian informasi cuaca setiap hari, pelatihan mitigasi bencana, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan langkah yang diambil oleh BPBD untuk secara berkelanjutan mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang. Program tersebut juga didukung oleh pemerintah desa. Kepala Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa:

“Desa Sukamakmur sudah termasuk ke dalam DESTANA (Desa Tangguh Bencana), dan kami sudah resmi” (Informan B1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Desa Sukamakmur telah memiliki legalitas sebagai Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana banjir. Dengan adanya DESTANA, pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Karawang diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan mitigasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi program mitigasi ini mencerminkan upaya BPBD Kabupaten Karawang dalam mengembangkan sistem kesiapan yang melibatkan masyarakat di Desa Sukamakmur. Pelaksanaan program-program tersebut tidak hanya terpusat pada penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang risiko bencana serta langkah-langkah untuk mengurangi dampak banjir di area tempat tinggal mereka. Peneliti juga menilai bahwa program mitigasi banjir yang dijalankan BPBD Kabupaten Karawang sudah cukup beragam dan berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya program DESTANA, pelatihan mitigasi bencana, serta penyebaran informasi cuaca harian yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai

bentuk upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Desa Sukamakmur terhadap ancaman banjir.

Dampak Program untuk Masyarakat

Program pengurangan dampak bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang di Desa Sukamakmur tidak hanya terfokus pada langkah-langkah penangan bencana, namun juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya banjir. Melalui berbagai inisiatif yang dilakukan, BPBD berusaha memperkuat kemampuan masyarakat untuk lebih siap menghadapi situasi darurat yang berkaitan dengan bencana. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Informan A1 dari BPBD Kabupaten Karawang bahwa:

“Program dari BPBD yaitu, Sosialisasi KIE Rawan Bencana, Mitigasi Bencana, dan Penguatan Kapasitas Kawasan” (Informan A1)

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menganalisis bahwa upaya yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang lebih fokus pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana banjir. Program Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait bencana dilaksanakan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang ancaman banjir serta tindakan yang harus diambil ketika bencana terjadi. Di samping itu, program mitigasi dan peningkatan kapasitas daerah juga menjadi usaha untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat di kawasan yang rawan banjir, seperti desa sukamakmur.

Dampak dari program tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat, pada saat wawancara Informan C1 menyampaikan bahwa:

“Masyarakat jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan kalau banjir datang” (Informan C1)

Hal serupa juga disampaikan langsung oleh Informan C3 yang menyatakan sebagai berikut:

”Ya saya pribadi menjadi lebih paham soal kesiapsiagaan banjir, dan jadi lebih peduli mengenai pentingnya memahami ancaman bencana” (Informan C3)

Berdasarkan pernyataan masyarakat diatas, peneliti memahami bahwa program mitigasi yang diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Karawang membawa dampak yang baik terhadap meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan bencana banjir. Hal tersebut terlihat dari mulai munculnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya persiapan dan usaha dalam mengurangi risiko bencana di wilayah tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa inisiatif mitigasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang telah memberikan dampak pada peningkatan kemampuan warga Desa Sukamakmur dalam menghadapi bencana banjir. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya berhasil mengurangi frekuensi banjir yang terjadi secara berulang, program ini dianggap efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan keterlibatan masyarakat terkait risiko bencana banjir di Desa Sukamakmur.

Kendala Utama dalam Program

Dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana banjir di Desa Sukamakmur, BPBD Kabupaten Karawang masih mengalami sejumlah kendala yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kurangnya fasilitas pendukung, tetapi juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman masyarakat tentang program mitigasi yang sedang dijalankan. Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Informan A1 dari BPBD Kabupaten Karawang sebagai berikut:

“Kendala utamanya adalah fasilitas pendukung seperti laptop terbatas, ruangan rapat yang terbatas untuk membahas regulasi dan menentukan kebijakan” (Informan A1)

Selain adanya kekurangan dalam fasilitas pendukung, informan juga menyebutkan bahwa ada kendala dalam hal sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Keterbatasan SDM, tidak semua masyarakat memahami teknologi yang diberikan dan belum tereduksi secara menyeluruh” (Informan A1)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat diartikan bahwa keterbatasan sarana dan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu halangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pengurangan risiko banjir di Desa Sukamakmur. Kurangnya fasilitas pendukung seperti alat kerja dan ruang untuk berkoordinasi mengakibatkan proses perencanaan serta pembahasan kebijakan mitigasi belum dapat dilakukan dengan baik. Di samping itu, minimnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai teknologi dan pengurangan risiko bencana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan mengenai bencana masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari program mitigasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menganalisis bahwa hambatan utama dalam implementasi program mitigasi banjir di Desa Sukamakmur disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendukung, terbatasnya Sumber Daya Manusia, serta belum meratanya pengetahuan

masyarakat tentang mitigasi dan pemanfaatan teknologi dalam menghadapi bencana. Keadaan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program mitigasi belum optimal dan masih memerlukan peningkatan dukungan sarana, kapasitas SDM, serta pendidikan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam mitigasi bencana banjir di Desa Sukamakmur, dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi yang dilakukan telah mencakup dimensi tujuan, kebijakan, dan program. Pada dimensi tujuan, BPBD Kabupaten Karawang berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir melalui edukasi kebencanaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Pada dimensi kebijakan, mitigasi dilaksanakan melalui pendekatan non-struktural berbasis pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan (satgas), dan instansi terkait, meskipun koordinasi lintas sektor masih belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur pembagian tugas secara rinci. Sementara pada dimensi program, BPBD telah melaksanakan berbagai program seperti DESTANA, Sosialisasi KIE, pelatihan kebencanaan, dan penyebaran informasi cuaca yang cukup meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran sehingga diperlukan optimalisasi program serta penguatan koordinasi agar mitigasi bencana banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFRERENSI

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen risiko. *Reformasi*, 5(1), 13–30.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Kepala BNPB tinjau penanganan banjir di Karawang dan serahkan bantuan Rp500 juta*. <https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-tinjau-penanganan-banjir-di-karawang-dan-serahkan-bantuan-500-juta->
- BPBD Kabupaten Karawang. (2017). *BPBD Kabupaten Karawang (@bpbdkrwkab) [Instagram profile]*. Instagram. <https://www.instagram.com/bpbdkrwkab/>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Governance. *Governance*, 1(2).
- Heryana, A. (n.d.). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/>

- Imran, S. Y., & Puluhulawa, F. U. (2022). Mitigasi bencana dan pengalokasiannya pada Dana Desa Botumoito. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 124–131. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.336>
- Maulana, I. (2024, January 8). *Banjir Karawang meluas, 6 desa terendam-ribuan orang mengungsi*. detikJabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7130237/banjir-karawang-meluas-6-desa-terendam-ribuan-orang-mengungsi>
- Mahendra, M. R. (2023). *Strategi mitigasi bencana gempa bumi Sesar Lembang di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Metro TV. (2025). *Warga Sukamakmur desak pemda bangun bendungan*. <https://www.metrotvnews.com>
- Nanda Galih Saputra, Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Strategi penanggulangan bencana banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar sebagai desa tangguh bencana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 62–76.
- Pemerintah Desa Sukamakmur. (2017, September 18). *Profil Desa Sukamakmur*. <https://desasukamakmurweb.wordpress.com/profil-desa/>
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2021a). *Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang*.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2021b). *Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021*.
- Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. (2022). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022*. <https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2022/mobile/index.html>
- Saladin. (2018). *Manajemen strategi Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang* [Skripsi].
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, N. (2020). Peran pemerintah dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 425–436.
- Tamburaka, E., & Hasddin, H. (2021). Tingkat kerawanan dan arahan pengendalian pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 137–148. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2>
- Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bekti, H. (2022). Analisis kesiapsiagaan bencana banjir di Jakarta. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 302–316. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37997>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.